

Visi dan Misi Jokowi dan Ma'ruf Amin

“Melihat dari Perspektif Pasal 28
H dan Pasal 33 UUD 1945”



Visi dan Misi Jokowi-Ma'ruf



Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

1

Peningkatan kualitas manusia Indonesia

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing

2

Pembangunan yang merata dan berkeadilan

3

4

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

5

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

6

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga

7

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

8

9

Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan

5 ISU STRATEGIS TERKAIT LINGKUNGAN DI INDONESIA

Pengelolaan Hutan dan Gambut Secara Berkelanjutan,

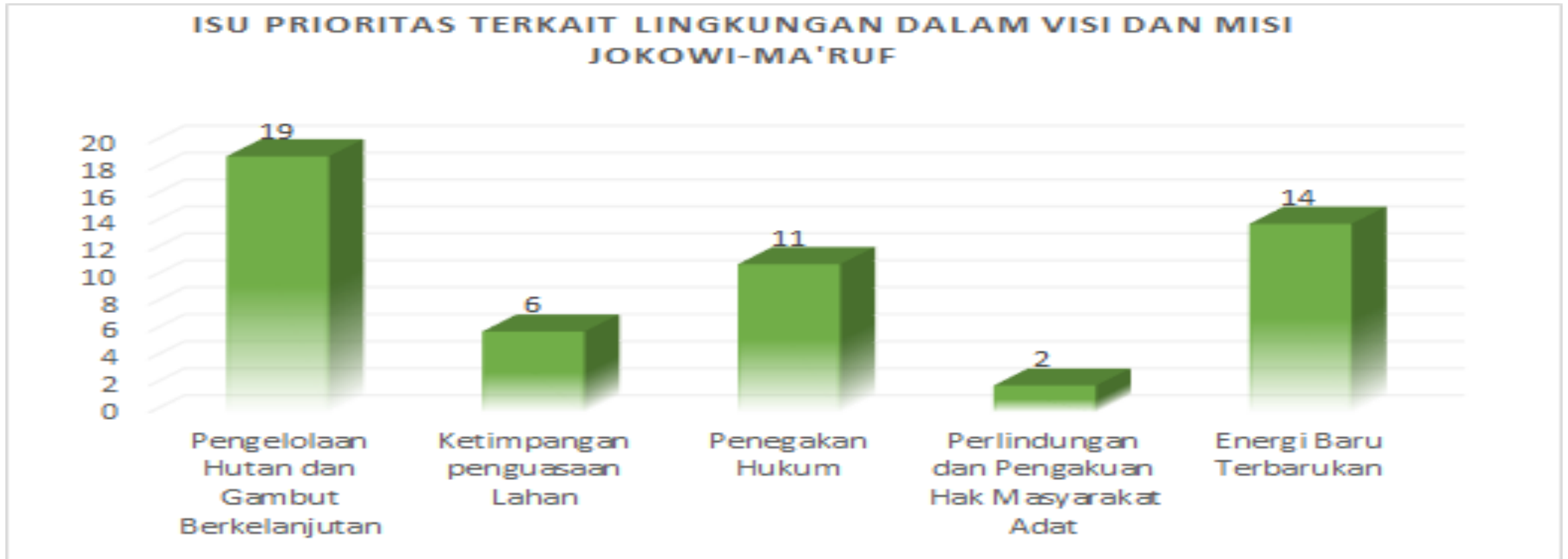
Ketimpangan Penguasaan Lahan

Penegakan Hukum

Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

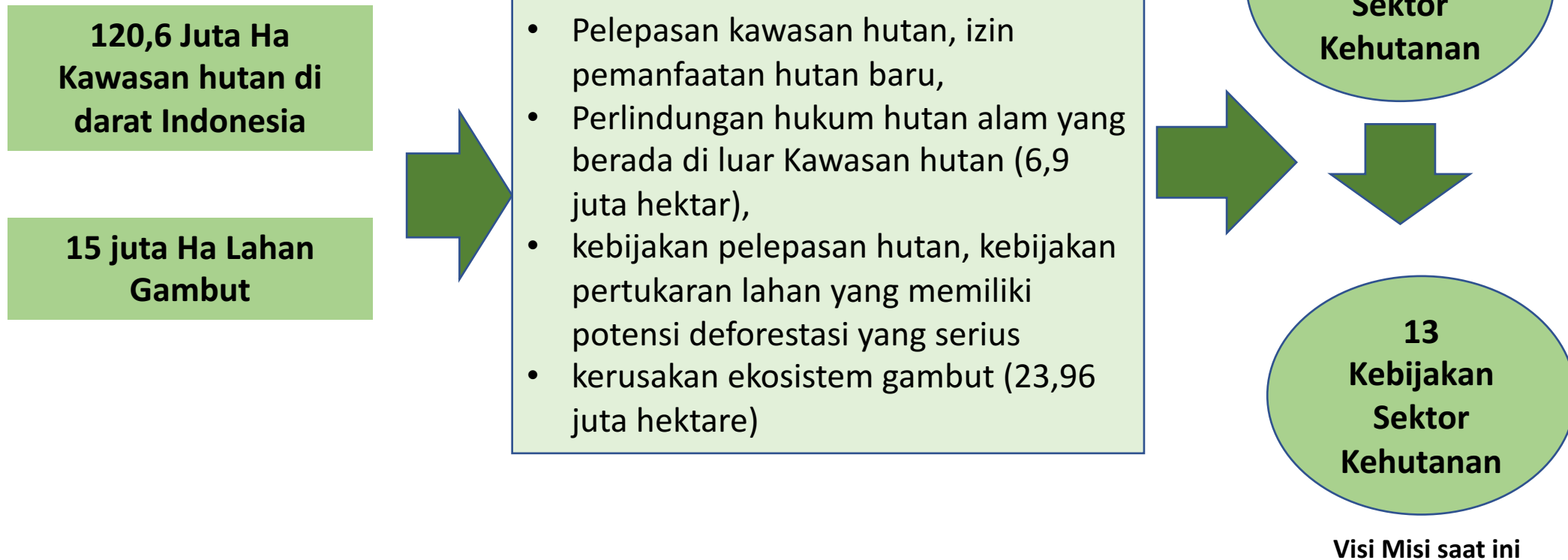
Energi Baru Terbarukan (EBT)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan **lingkungan hidup** yang baik (Pasal 28 H)...**Bumi Dan Air Dan Kekayaan Alam** yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besar kemakmuran rakyat (Pasal 33)



17 % (44 butir) dari total butir program aksi Jokowi-Maruf Membahas terkait Pengelolaan Hutan dan gambut Berkelanjutan, Penegakan Hukum, dan energi baru Terbarukan (EBT) dan 3 % (8 butir) dari total butir program aksi Jokowi-Maruf membahas terkait Perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat serta ketimpangan penguasaan lahan,

Pengelolaan Hutan dan Gambut Secara Berkelanjutan,



Upaya Dalam Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan



MISI 4

**Pengembangan
kebijakan
tataruang
terintegrasi**

**Mitigasi
perubahan
iklim**

**Penegakan
hukum dan
rehabilitasi
lingkungan
hidup**



13 Kebijakan Pengelolaan Hutan dan lahan Jokowi-Ma'ruf

Kebijakan Satu Peta

Pengawasan

Pencegahan Kebakaran Hutan

Pengembangan Energi baru

Terbarukan

Konservasi Lahan Gambut

Penanaman kembali lahan-lahan kritis

Mengurangi Emisi Karbon

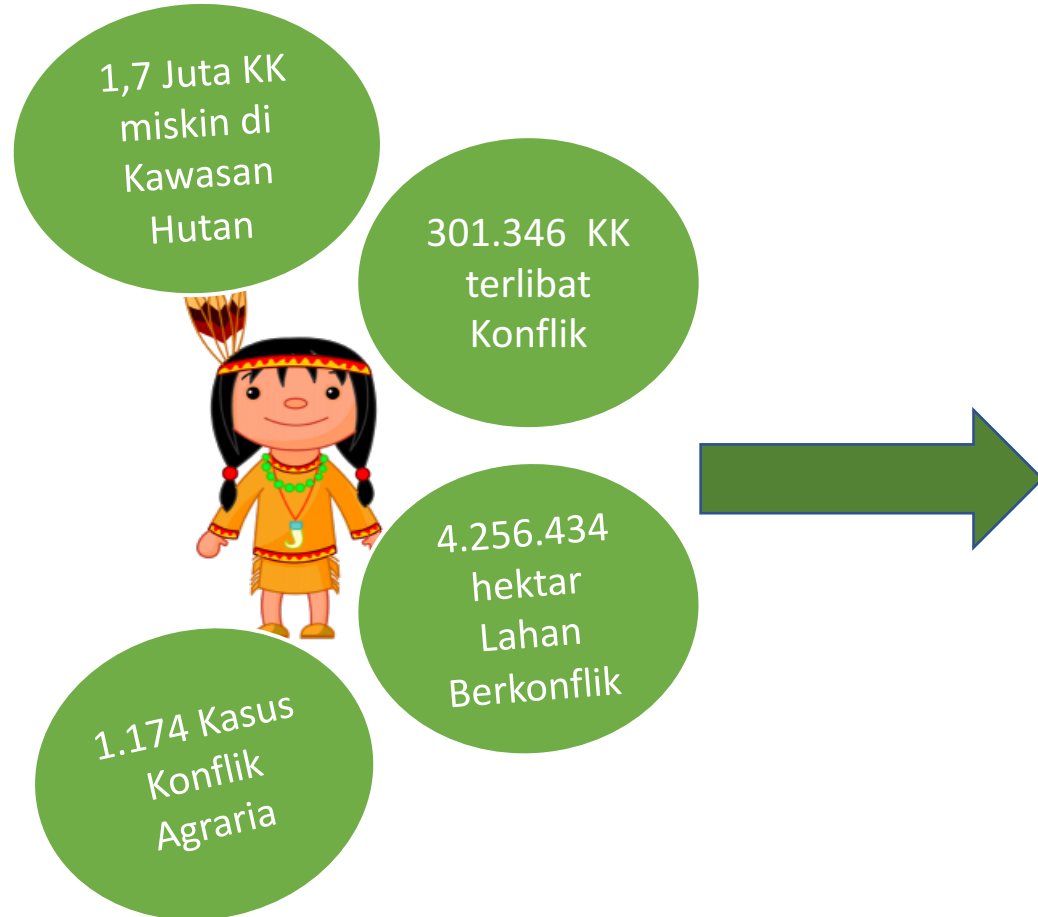
Pendidikan Konservasi Lingkungan

Memperbanyak Hutan Kota dan

Ruang Terbuka Hijau

Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan

Ketimpangan Penguasaan Lahan



Komitmen sebelumnya

Program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta ha dan perhutanan sosial 12,7 juta Ha

Melanjutkan pendampingan masyarakat

Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial

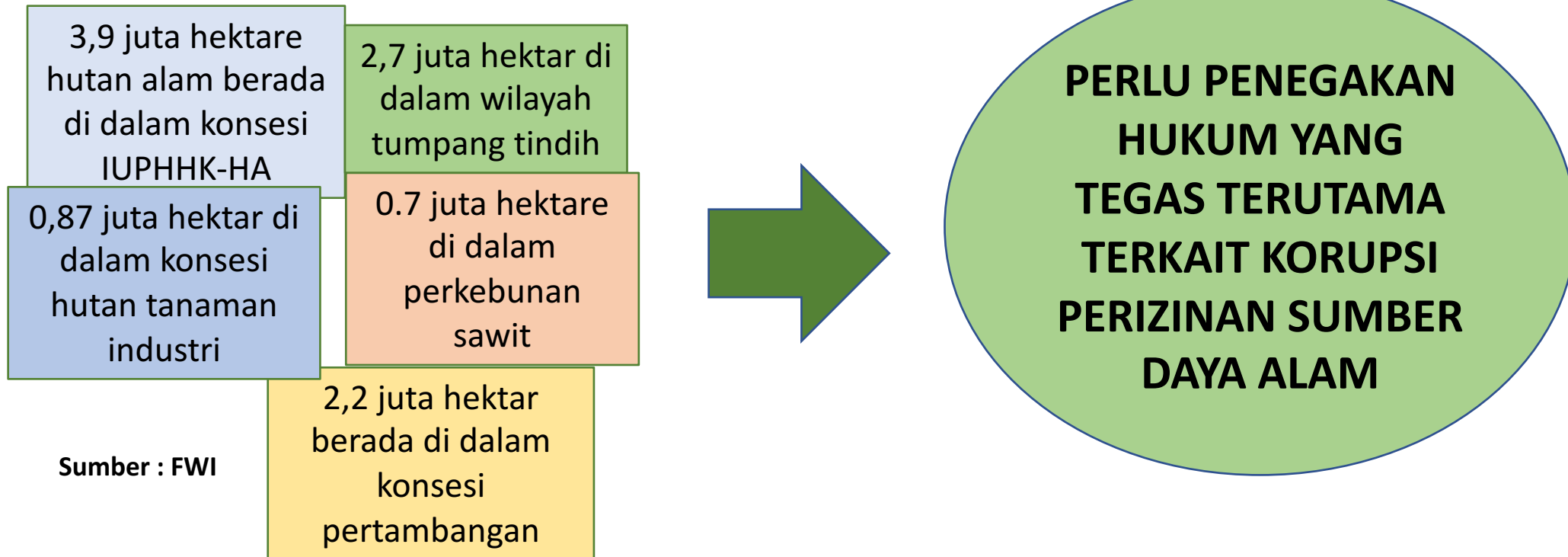
Visi Misi saat ini

Meneruskan/meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, kemitraan dan legalisasi tanah perkebunan rakyat,

Mempercepat percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah-tanah milik rakyat dan tanah wakaf

Misi ke 6

PENEGAKAN HUKUM



Misi ke 6 : Melaksanakan secara konsisten strategi nasional pencegahan korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

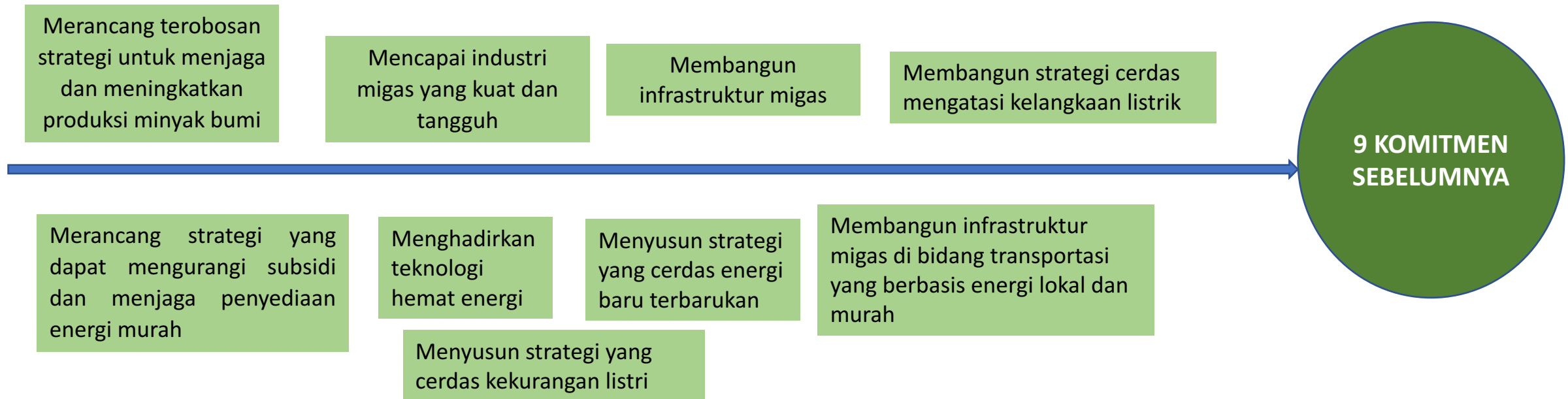


Visi dan Misi sebelumnya

Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal spek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari

Meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat

ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)



Visi Misi ke depan: Pengembangan energi terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan, meneruskan program-program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil, meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional serta meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025 (Penggunaan energi terbarukan **23% dari total konsumsi bahan bakar nasional**)

REKOMENDASI

- **Perlu Komitmen Jokowi-Ma'ruf** dalam melanjutkan kebijakan pada periode sebelumnya terutama terkait dengan 14 (empat belas) butir kebijakan di sektor kehutanan, 2 (dua) komitmen reforma agraria, 6 komitmen terkait masyarakat adat serta evaluasi, menghadirkan teknologi hemat energi dan merancang isu perubahan iklim tidak hanya untuk isu lingkungan melainkan juga untuk perekonomian .
- **Perlu kebijakan terintegrasi** yang mengakomodasi penghentian deforestasi, penghentian dan evaluasi izin-izin sumber daya alam
- Perlu sebuah butir yang menyebutkan dengan tegas **tindakan penegakan hukum** untuk korupsi di sektor sumber daya alam, baik terkait perizinan di Kawasan hutan, tambang, dan lainnya
- **Perlu komitmen dalam melanjutkan kebijakan reforma agraria** yaitu pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui *land reform* dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektare dan perhutanan sosial 12,7 juta hektare. Selain itu perlu perhatian khusus dalam penyelesaian konflik tenurial dan penataan desa di kawasan hutan
- **Perincian Program Aksi** diperlukan agar tidak tercipta ruang terlalu luas untuk tidak memenuhi janji-janji kampanye.



Madani

PETA JALAN MENUJU INDONESIA NOL DEFORESTASI

